

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MUSI
RAYA TEBING TINGGI DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

SKRIPSI



Oleh :

ADELYA ANASTASYA

07011381520122

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEAYANAN PASAR
TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

**ADELYA ANASTASYA
07011381520122**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 12 April 2019

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001**



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

**PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR MUSI RAYA TEBING TINGGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 Mei 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 1969211251989121001
Ketua



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001
Anggota



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
Anggota

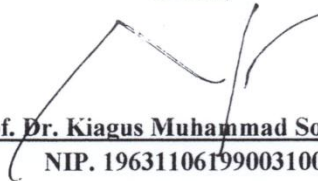


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota



Palembang, Mei 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas Alva Edison)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia.” (Nelson Mandela)

Skripsi ini,

Ku Persembahkan Kepada:

Panutanku: Orang tuaku (Ayatullah & Emi Ruspianti,

Muhammad Edwin & Nopita)

Penyemangatku: Adik-adikku Tersayang, Semua Keluarga

Almamater Kebanggaanku

ABSTRACT

This research is motivated by a decrease in the acceptance of the Tebing Tinggi Market Service Levy due to a lack of awareness for the mandatory retribution to pay daily Retribution for research conducted on how to manage market service fees at Tebing Tinggi. This study was analyzed by the theory of regional financial management using three dimensions namely, dimensions of planning, implementation, and supervision. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews and documentation studies. The results of this study note that the management carried out has not gone well, the government has made a Regional Regulation on market service retribution but the regulation has not been properly enforced, there are still many traders who do not occupy kiosks and stalls that have been made by the government and choose to trade in highways and lack of human resources in managing collection of market service fees. From the results of this study, suggestions can be given to the Technical Implementation Unit of the Tebing Tinggi Market Area, which must enforce administrative sanctions to traders who do not pay retribution.

Keywords: Market Service Retribution, Regional Financial Management

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

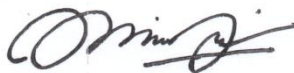
Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

**Inderalaya, 25 April 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik
Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan menurunnya penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tebing Tinggi yang disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi wajib retribusi untuk membayar uang Retribusi harian untuk itu dilakukan penelitian bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Tebing Tinggi. Penelitian ini dianalisis dengan teori pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan tiga dimensi yakni, dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan belum berjalan dengan baik, pemerintah sudah membuat Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pasar namun peraturan tersebut belum ditegakkan dengan benar, masih banyak pedagang yang tidak menempati kios dan los yang sudah dibuat pemerintah dan memilih berdagang di pinggi jalan serta kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Dari hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan kepada pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tebing Tinggi yakni harus menegakkan sanksi administratif kepada pedagang yang tidak membayar uang retribusi.

Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Pasar, Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Inderalaya, 25 April 2019

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan segala rahmat dan ridho yang diberikan-Nya, penulis dapat diizinkan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam juga dipanjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Judul dari skripsi ini adalah “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”. Skripsi ini disusun bukan hanya untuk syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya akan tetapi dalam porses penyusunan Skripsi ini banyak pelajaran yang dapat diambil salah satunya perjuangan yang serius akan membawa hasil yang baik.

Sejak awal hingga skripsi ini penulisan skripsi ini selesai banyak melibatkan pihak yang sangat membantu penyelesaian Skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua ku Ayatullah dan Emi Ruspanti yang selalu memberikan doa, dukungan materi, serta kasih sayang.

2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

4. Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas masukanyang berharga sehingga penulis dapat diarahkan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

5. Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas masukan dan bimbingan yang berharga sehingga penulis dapat diarahkan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

6. DR. Nurmah Semil, M.Si selaku Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan bimbingan setiap semesternya sehingga saya bisa menyelesaikan salah satu syarat kelulusan S1.

7. Dony Maha Putra selaku Partner terbaik yang selalu membantu dan mensupport penyelesaian Skripsi ini.

8. Tartila Pratiwi selaku saudara tak sedarah yang selalu siap menemani dalam pembuatan Skripsi ini.

9. Delby Selvina, Melly Susanti, Zumrotul Fadhilah selaku saudara sekaligus dosen pembimbing ke-3 yang selalu memberi masukan untuk skripsi ini dan rekan-rekan Administrasi Publik 2015 lainnya.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk skripsi ini dari pembaca baik dari segi penulisan maupun dari segi ilmiah apabila masih ditemukan kesalahn-kesalahan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.

Palembang, 20 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR SINGKATAN xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori..... 6

1. Keuangan Negara..... 6

2. Keuangan Daerah.....	7
3. Pengelolaan.....	8
a. Perencanaan.....	9
b. Pelaksanaan.....	10
c. Pengawasan.....	11
4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
5. Retribusi Daerah.....	13
6. Retribusi Pelayanan Pasar.....	15

B. Penelitian Terdahulu.....	16
------------------------------	----

C. Kerangka Pemikiran	17
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	19
--------------------------	----

B. Definisi Konsep.....	19
-------------------------	----

C. Fokus Penelitian.....	20
--------------------------	----

D. Informan Penelitian.....	21
-----------------------------	----

E. Data dan Sumber Data.....	22
------------------------------	----

F. Teknik Pengumpulan Data.....	23
---------------------------------	----

G. Teknik Analisis Data.....	23
------------------------------	----

H. Sistematika Penulisan.....	25
-------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
---	----

1. Masa Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.....	26
--	----

2. Visi, Misi Kabupaten Empat Lawang.....	28
---	----

3. Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pasar Tebing Tinggi.....	28
---	----

4. Visi Misi (UPTD) Pasar Tebing Tinggi.....	28
--	----

5. Tugas Pokok dan Fungsi (UPTD) Pasar Tebing Tinggi.....	29
B. Pembahasan.....	30
1. Perencanaan.....	30
1.1 Perencanaan Objek Retribusi.....	31
1.2 Perencanaan Pengenaan Tarif Retribusi.....	33
1.3 Perencanaan Sumber Daya Manusia.....	34
1.4 Perencanaan Penyediaan Fasilitas Penunjang Pasar.....	36
1.5 Perencanaan Pemungutan Retribusi.....	36
2. Pelaksanaan.....	38
2.1 Pelaksanaan Terhadap Objek Retribusi.....	38
2.2 Pelaksanaan Terhadap Pengenaan Tarif Retribusi.....	40
2.3 Pelaksanaan Terhadap Sumber Daya Manusia.....	43
2.4 Pelaksanaan Terhadap Penyediaan Fasilitas Penunjang Pasar.....	46
2.5 Pelaksanaan Terhadap Pemungutan Retribusi.....	47
3. Pengawasan.....	50
3.1 Pengawasan Langsung.....	51
3.2 Pengawasan Tidak Langsung.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan.....	54
Saran.....	56
Daftar Pusaka.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Retribusi Pelayanan Pasar dan Realisasi	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3 Fokus Penelitian	21
Tabel 4 Jumlah Pegawai UPTD Pasar Tebing Tinggi	35
Tabel 5 Jumlah Pegawai Pelaksana Penagihan Retribusi	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kondisi Kios Pasar Tebing Tinggi	3
Gambar 2 Skema Penetapan Objek Retribusi Pelayanan Pasar	32
Gambar 3 Gdung Kios Pasar Tebing Tinggi	39
Gambar 4 Karcis Harian Retribusi Pelayanan Pasar	41
Gambar 5 Dokumentasi bersama pedagang Pasar	42
Gambar 6 Kondisi Kantor UPTD Pasar Tebing Tinggi	46
Gambar 7 Proses Alur Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	48

DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PTM	: Pasar Tradisional Modern
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
TR	: Tarif Retribusi
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
TKS	: Tenaga Kerja Sukarela
SKRDBT	: Surat Ketetapan Retribusi daerah Bayar Tambah

SKRDLB	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
SPDoRB	: Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
SIPT	: Surat Izin Penunjukkan Tempat
KIPTB	: Kartu Izin Penunjukkan Tempat Berdagang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan

membedakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut sangatlah berpengaruh untuk pembangunan nasional, pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya membantu meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selain memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini dikarenakan setiap daerah dirasa lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi potensi daerah, yang mempunyai peluang

untuk dikembangkan, dan apa yang menjadi kekurangan dari masing-masing daerah untuk selanjutnya diperbaiki.

Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:100) Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar seringkali dihadapkan dengan kendala-kendala saat pelaksanaannya, seperti yang sudah diamati di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten ini memiliki 2 Pasar yaitu Pasar Musi Raya Tebing Tinggi dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Pendopo, dengan kondisi pasar yang cukup memperhatikan baik dalam kebersihan maupun ketertiban tempat berjualan. Begitupun dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar masih banyak pedagang yang tidak menaati aturan untuk yang telah dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang nya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat. Kabupaten Empat Lawang berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk

menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan pasar. Berdasarkan dokumentasi di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan pasar : Kurang tegasnya sanksi yang sudah diberlakukan dalam penagihan retribusi pelayanan pasar yang menyebabkan adanya pedagang atau wajib retribusi menghindar dari bentuk penagihan retribusi. Dalam menjalankan retribusi pelayanan pasar, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan tiga jenis sanksi kepada pedagang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, yaitu sanksi administrasi, denda, dan pidana berupa kurungan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Namun dalam praktiknya belum pernah diterapkan sanksi tersebut terhadap wajib retribusi yang melanggar karena masih menerapkan sistem kekerabatan atau kekeluargaan.

Berikut hasil dokumentasi di lapangan yang menunjukkan bahwa keadaan pasar kurang baik.



Gambar 1 Kondisi Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Dilihat dari dokumentasi diatas kios-kios pasar masih banyak yang kosong dan menyebabkan capaian hasil Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang belum optimal, Sehingga kurang maksimalnya penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengelolaan dari Dinas Pengelolaan Pasar itu sendiri. Peran Pemerintah sangat menunjang sekali dalam peningkatan penerimaan retribusi pasar. Berikut tabel Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Empat Lawang :

Tabel 1 Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

No.	Tahun	Target Retribusi	Realisasi	Persentase
1.	2015	100.000.000,-	73.410.000,-	73%
2.	2016	100.000.000,-	93.290.000,-	93%
3.	2017	100.000.000,-	64.401.000,-	64%

Sumber :Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang,2018

Dari data pada tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Musi Raya Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, maka diperlukan penelitian mengenai Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Empat Lawang dapat optimal, serta bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan atau pengembangan pasar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pengetahuan mengenai Ilmu Administrasi Negara, khususnya konsentrasi keuangan negara. Karena masalah yang diteliti menyangkut salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan pasar di tebing tinggi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pemikiran atau masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang khususnya di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dan UPTD Pasar dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Musi Raya Tebing Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Blakely, Edward J., 1989, "Planning Local Economic Development (Theory and Practice)", Sage Publication, Inc, Newbury Park, California Suparmoko, M.2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek edisi 5*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Depdikbud.(1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Halim, Abdul, dkk. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Jaya, Andi. 2018. *Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Kaho, J. Riwu, 1988, "Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", Bina Aksara, Jakarta, 1997, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia", Gramedia, Jakarta.

Mardiasmo. 2018a. *Akuuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Yogyakarta : ANDI

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pratiwi, Nela. 2012. *Analisis Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2007-2011*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Rochmat, 1988, "Pajak dan Pembangunan", PT. Eresco, Bandung Sutarto, 2006,

"Dasar-dasar Organisasi", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara dan Daerah* : Pustaka Setia

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di*

Indonesia edisi revisi. Jakarta: PT.Rajagrafindopersada.